

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Z., & Nur, D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Daulay, I. R. (2020). Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8.
- Ekon.go.id. (2021). *Pemerintah Dorong UMKM Tingkatkan Daya Saing untuk Masuk Pasar Global*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3407/pemerintah-dorong-umkm-tingkatkan-daya-saing-untuk-masuk-pasar-global>
- Ekonomi.bisnis.com. (2021). *Aturan Baru PPh dan PPN dalam UU HPP Tegaskan Keberpihakan Pemerintah untuk UMKM*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211017/9/1455320/aturan-baru-pph-dan-ppn-dalam-uu-hpp-tegaskan-keberpihakan-pemerintah-untuk-umkm>
- Ekonomi.bisnis.com. (2022). *Ditjen Pajak Sarankan UMKM Rutin Catat Omzet Pendapatan Di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220215/259/1500726/ditjen-pajak-sarankan-umkm-rutin-catat-omzet-pendapatan-di-bawah-rp500-juta-bebas-pajak>
- Iin, A. H., Fistabella, S. J. A., Savira, A. N., & Wahyudi, K. E. (2021). Implementasi Insentif Pajak UMKM di Era Covid-19 di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 1. *Journal Publicuho*, 4(2), 520–535. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18097>
- Jdih.kemenkeu.go.id. (2022). *Dokumen Peraturan PMK No. 3/PMK.03/2022*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/728fd2a9-382b-4ae3-1feb-08d9e5e75e5d>
- Kemenkeu.go.id. (2022a). *Anggaran PEN 2022 Disederhanakan Menjadi Tiga Kelompok, Namun Tetap Fleksibel*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/anggaran-pen-2022-disederhanakan-menjadi-tiga-kelompok-namun-tetap-fleksibel/>
- Kemenkeu.go.id. (2022b). *Penyesuaian Tarif PPN Diiringi Fasilitas Insentif Serta Penyesuaian Perpajakan Lainnya Untuk Melindungi Masyarakat dan UMKM*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penyesuaian-tarif-ppn-diiringi-fasilitas-insentif-serta-penyesuaian-perpajakan-lainnya-untuk-melindungi-masyarakat-dan-umkm/>
- Kompas.com. (2016). *Sulitnya Memonitor 24.000 Wajib Pajak di Pasar Tanah Abang*.

<https://money.kompas.com/read/2016/10/17/190224826/sulitnya.memonitor.24.000.wajib.pajak.di.pasar.tanah.abang.?page=all>

Kompaspedia.kompas.id. (2021). *Sejarah Panjang Pasar Tanah Abang*. [https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/foto/pasar-tanah-abang?track\\_source=kompaspedia-paywall&track\\_medium=login-paywall&track\\_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/foto/pasar-tanah-abang/&status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/foto/pasar-tanah-abang?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/foto/pasar-tanah-abang/&status=sukses_login&status_login=login)

Laksmi, K. W. P., & Lasmi, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 291–299.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th ed.).

Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 4(98), 73–78.

News.ddtc.co.id. (2022). *Aturan Teknis Batas Omzet UMKM Belum Terbit, Ditjen Pajak Sarankan Ini*. <https://news.ddtc.co.id/aturan-teknis-batas-omzet-umkm-belum-terbit-ditjen-pajak-sarankan-ini-36841>

Pajak.go.id. (2018). *Memaksimalkan Manfaat Insentif Pajak untuk Pembangunan Bangsa*. <https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2022. (2022). Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. (2018). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1687–1704.

Resmi, S., & Barmawi, M. M. (2022). Pemanfaatan Insentif Pajak Untuk UMKM Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(1), 769–780.

Rohmah, A. H., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Blended Kuliner dan Fashion di Kabupaten Malang). *E – Jurnal Riset Manajemen*, 85–97.

Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei

- Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1096–1103.
- Soetjipto, N. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suhery, Putra, T., & Jasmalinda. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1–4.
- Tirtana, A. P., & Sadiqin, A. (2021). Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis*, 1(4), 299–306. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/38>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Widyawati, P., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *FPA-Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 1(1), 1–11. <http://dx.doi.org/xxxx/xxxx>